



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA

JALAN SWASEMBADA TIMUR XIII NO. 64, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14320
TELEPON (021) 43903634, 4371604, FAKSIMILE (021) 43903634
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkpjakarta@kkp.go.id

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

SURAT PENGANTAR
NOMOR B.118/BPPMHKP.JKT/TU.210/I/2026

No.	Naskah dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	Bersama ini kami sampaikan Hard Copy LKJ Tahunan Tahun 2025 pada Balai Besar KIPM Jakarta I	1 (satu) berkas	Disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Penerima
Nama Jabatan

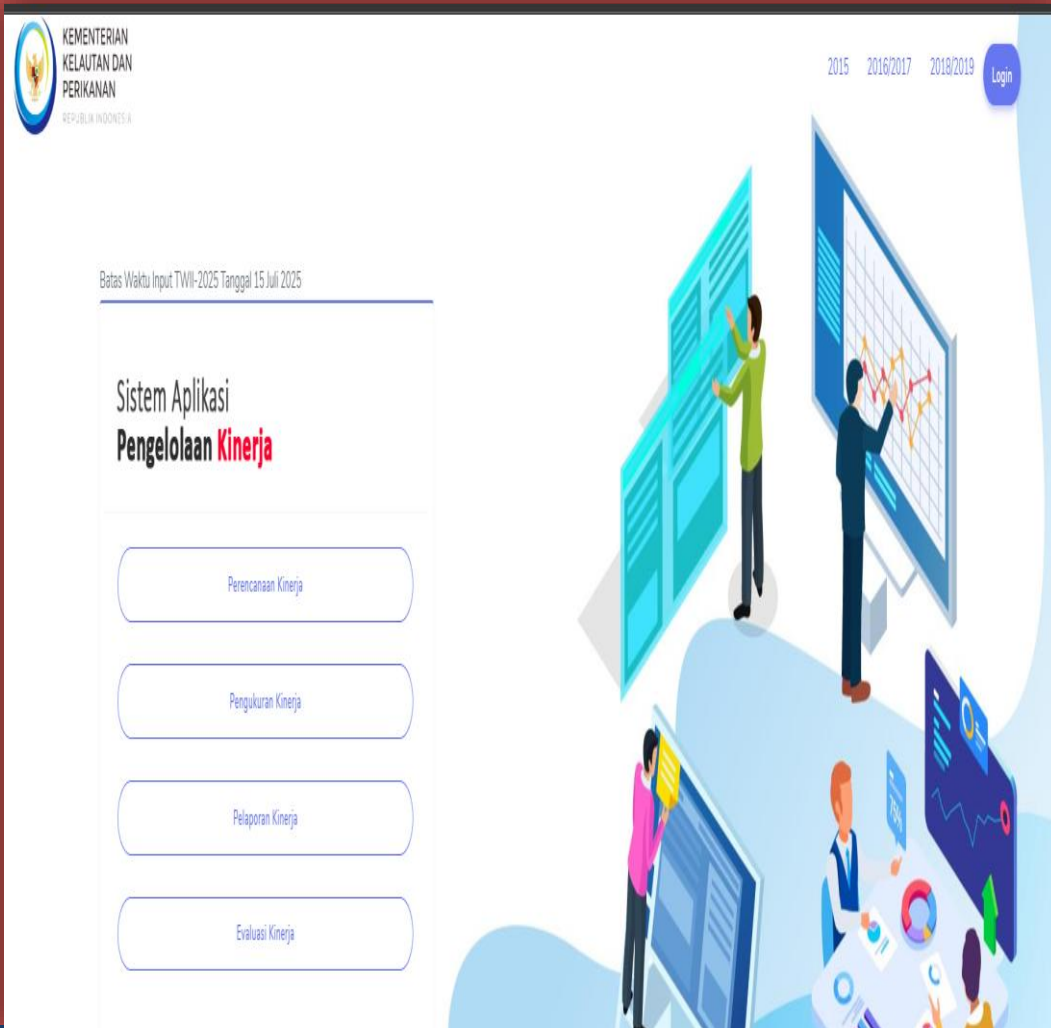
Jakarta, 28 Januari 2026
Pengirim
Plt. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta,



Ditandatangani
Secara Elektronik

()
Diterima tanggal, 2026

Dedi Supardi



LAPORAN KINERJAKU

TAHUNAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat Nya kegiatan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahunan Tahun 2025 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Kinerja ini sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan misi organisasi yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKj ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang pencapaian kinerja operasional perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditetapkan untuk periode TahunanTahun 2025 yang disusun dengan pendekatan Balance Scorecard (BSC). LKj menyajikan realisasi IKU yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Kami menyadari bahwa LKj masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Tangerang, 21 Januari 2026

Plt Balai Besar KIPM Jakarta I



Ditandatangani
Secara Elektronik

Agung Santoso



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
 BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	5
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 VISI DAN MISI	11
2.2 CAPAIAN KINERJA.....	13
2.3. ANALISIS DAN EVALUASI	14
2.3.1. SK.I. <i>Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)</i>	15
2.3.2. SK.II. <i>Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)</i>	17
2.3.3. SK.III. <i>Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)</i>	20
2.3.4. SK.IV. <i>Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar JAKARTA I</i>	23
2.3.5. SK.V. <i>Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I</i>	25
2.3.6. SK.VI. <i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I</i>	28
2.3.7. SK.VII. <i>Nilai Survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai Besar KIPM Jakarta</i>	32
2.4 REALISASI ANGGARAN.....	36
BAB III PENUTUP.....	37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahunan Tahun 2025 adalah sebesar **110,56%** Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar KIPM Jakarta I yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

A. Dari 7 IKK yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2025, 3 IKK Sudah pencapaiannya memenuhi atau melebihi target adalah sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I

NKO 110.56%

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Setoran	Pelaksanaan	Persentase	Target 2025	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Target 2025	Capaian 2025	%
SK.01	Tertelenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						113,67			113,67	
IKSK.1	Data Dukung1	Potensi	Maximize	Nilai Pariri Akhir	70	70	100	120	70	100	120
IKSK.2	Data Dukung1	Potensi	Maximize	Nilai Pariri Akhir	70	70	125,04	120	70	125,04	120
IKSK.3	Data Dukung1	Potensi	Maximize	Nilai Pariri Akhir	99	99	100	101,01	99	100	101,01
SK.03	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						107,45			107,45	
IKSK.03.1	Data Dukung1	Potensi	Maximize	Nilai Pariri Akhir	100	100	100	100	100	100	100
IKSK.03.2	Data Dukung1	Indikator	Maximize	Nilai Pariri Akhir	82	82	84,89	103,52	82	84,89	103,52
IKSK.03.4	Data Dukung1	Potensi	Maximize	Nilai Pariri Akhir	85	85	100	117,65	85	100	117,65
IKSK.03.5	Data Dukung1	Indikator	Maximize	Nilai Pariri Akhir	3,36	3,36	3,65	108,63	3,36	3,65	108,63

Gambar 1. Gambaran hasil Penilaian IKK



Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I target 2025 70 % target September 70 % maka capaian September 100% di hitung secara Persentase capaian 120%

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I target 2025 70 % target September 70% Capaian September 147,91 % di hitung secara persentase capaian 120%

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I target 2025 85 % target September 2025 85% capaian September 117,65 %di hitung secara Persentase capaian 117,65%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar KIPM Jakarta I merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi BPPMHKP berkaitan penyelenggaraan , Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Keamanan Hayatikan. menjamin mutu hasil perikanan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar KIPM Jakarta I dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama satu triwulan pada Tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Disamping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang di lingkungan Balai Besar KIPM Jakarta I serta sarana untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar KIPM Jakarta



1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon III dan IV di Balai Besar KIPM Jakarta I menjadi Jabatan Fungsional sehingga struktur organisasi Balai Besar KIPM Jakarta I berubah seperti pada Gambar 2.

Pada melaksanakan tugas Balai Besar KIPM Jakarta I sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2024 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dalam pelaksanaannya membentuk Tim Kerja pada bidang masing-masing. Pada Balai Besar KIPM Jakarta I Tim kerja menjadi 4 bagian sesuai dengan surat tugas kepala Balai Besar KIPM Jakarta I nomor B: 4272/BBK.JKT.I/KP.440/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024

- 1) Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kelautan dan Perikanan
- 2) Tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan
- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I
- Rasio Ekspor Ikan dan hasil Perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Tata Kelola Pemerintah yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pegawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

- Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I
- Index Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I
- Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Balai Besar KIPM Jakarta I mempunyai fungsi antara lain : a) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; b) pelaksanaan sertifikasi kesehatan Ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*); c) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan Instalasi; d) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; n) penerapan Sistem Manajemen Mutu pelayanan operasional dan laboratorium; p) pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati Ikan; dan q) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai Besar KIPM

Jakarta I sejumlah 43 pegawai yang terdiri dari 18 Pegawai berstatus PNS yaitu 1 pegawai pejabat struktural, 3 Inspektur Mutu Hasil Perikanan Madya, 4 Inspektur Mutu Hasil Perikanan Muda, 2 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda, 1 Pranata Komputer Muda, 1 Arsiparis Muda, 1 Inspektur Mutu Hasil Perikanan Pertama, 3 Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, 2 Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, 1 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama, 1 Pranata Keuangan APBN Penyelia, 1 Pranata Keuangan APBN Terampil, 2 Fungsional Umum, 19 orang PPNPN, 5 Tenaga Outsourcing, 2 Tenaga Outsourcing Driver dan Editing. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien. Selain itu, Balai Besar KIPM Jakarta I juga mempertimbangkan komposisi dari segi

jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I dalam perspektif *learning and growth*.

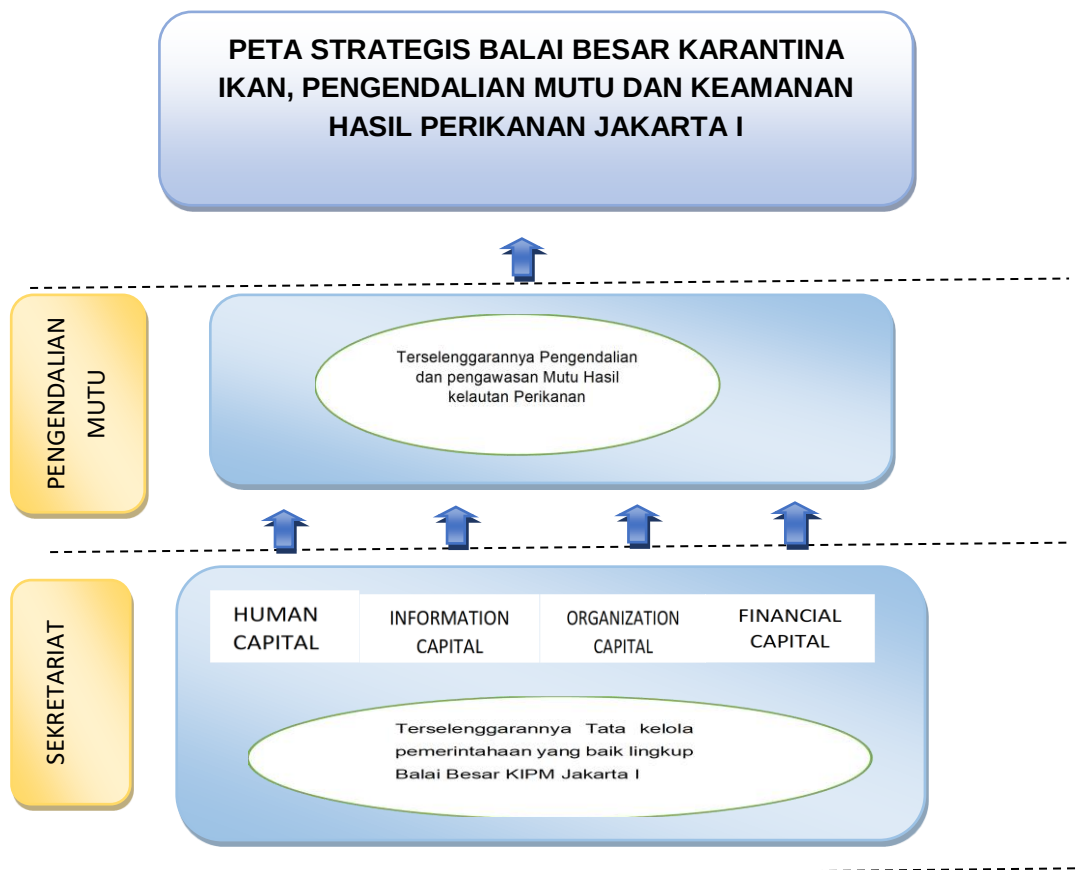
Gambar 3. Keragaan SDM Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2025



1.3.SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan IKK sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun berjalan. Setiap IKK disertai rencana tingkat capaian (target) masing- masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam RENSTRA. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki IKK yang terukur.

Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan RESNTRA Organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan IKK dan target kinerja yang akan dicapai Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam PK Balai Besar KIPM Jakarta I. Penyusunan PK ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



Gambar 4. PETA STARATEGIS

PK ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BPPMHKP adan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/KEP- BPPMHKP/2018 tentang Pedoman Pengeloaan Kinerja di Lingkungan

BPPMHKP. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2025 diuraikan seperti pada Tabel 1 berikut ini:



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
 LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN JAKARTA I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Anggoro**
 Jabatan : **Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
 Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
 Kepala Badan Pengendalian dan
 Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
 Perikanan



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
 Plt. Balai Besar Karantina Ikan,
 Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
 Perikanan Jakarta I



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Sri Angoro

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN JAKARTA I

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
	2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
	3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	99
SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	100
	5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Nilai)	87
	6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	85
	7. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.917.575.849
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	177.500.000
Total Anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2025		6.095.075.849

Tangerang, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
 Kepala Badan Pengendalian dan
 Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
 Perikanan



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
 Plt. Balai Besar Karantina Ikan,
 Pengendalian Mutu dan Keamanan
 Hasil Perikanan Jakarta I



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Sri Angoro

Gambar 5. Perjanjian Kinerja

Revisi PK pada bulan Desember 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4138, JRP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
 LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN JAKARTA I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agung Santoso**
 Jabatan : Pjt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
 Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 8 Desember 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Pjt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I



Agung Santoso

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN JAKARTA I

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
	2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
	3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	99
SK.2 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	100
	5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Nilai)	82
	6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I	86
	7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	85
	8. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Indeks)	3,36

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.917.575.849
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	177.500.000
Total Anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2025		6.095.075.849

Tangerang, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
 Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
 Pjt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I



Ditandatangani Secara Elektronik

Agung Santoso

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi Balai Besar KIPM Jakarta I ditetapkan dengan Visi KKP 2020-2024 dan BKIPM yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

Aspek yang berkaitan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) adalah

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan pendukung pengolahan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan
2. Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk BPPMHKP Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan

kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

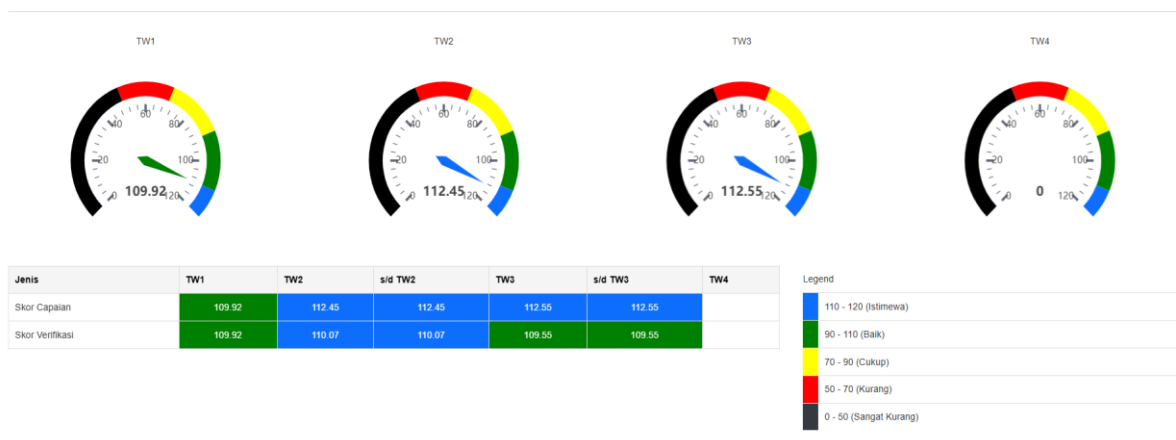
Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024 - 2028, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (dua) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

2.2 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I merupakan kinerja secara kolektif dari 3 (tiga) bidang di lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi dalam menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagaimana **dituangkan dalam RPJMN 2020-2024**, telah ditetapkan total ukur berserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian secara berjenjang dan dilakukan pengukuran secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan. Potret kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahunan 2025 sangat Baik hal ini tercermin dari capaian 2 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja kegiatan (IKK) yang memiliki nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 112.55 %. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.



Gambar 6. Dashboard NPSS Balai Besar KIPM Jakarta I Tahunan 2025

2.3 Analis dan Evaluasi

Elaborasi capain kinerja berdasarkan sasaran strategi secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggarannya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)

70

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)

70

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)

99

2.3.1.SK.I. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti



Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Rumus

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
B = Persentase Unit menerapkan CPIB
C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
Xn= Jumlah dan unsur Pembentuk

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)							
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025					Renstra BPPMHKP
TW I	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	%Capaian thd Target Restra
0	0	70 %	0	0	70	0	70
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	%Capaian thd Target Restra
0	0	70 %	100 %	120%	70 %	100%	70
TW III	Target 2024	Target III	Realisasi Tw III	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	%Capaian thd Target Restra
0	0	70	100%	120%	70	100%	70
TW IV	Target 2024	Target III	Realisasi Tw III	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	%Capaian thd Target Restra
0	0	70	100%	120%	70	100%	70

1. Capaian IKU

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Pada Tahunan 2025, target indikator sebesar **70%**, dengan realisasi mencapai **100%**.

Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sektor produksi primer terhadap penerapan standar **CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB**, serta **CPIB di kapal perikanan tangkap**. Keberhasilan tersebut juga didukung oleh efektivitas pembinaan, pendampingan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten dalam menjamin mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan sejak hulu.dengan rincian sebagai berikut :



Jika dibandingkan dengan **Target PK Tahun 2025 sebesar 70%**, realisasi Tahunan telah mencapai **120%**, sehingga secara kinerja indikator ini **telah tercapai dan melampaui target Renstra**.

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

$$\% X = \frac{A+D}{xn} \times 100\%$$

$$\% X = \frac{3+1}{4} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Capaian hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan menunjukkan kinerja positif seiring dengan meningkatnya penerapan standar teknis seperti Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), serta penerapan prinsip sanitasi dan higiene pada unit usaha perikanan. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan sertifikasi secara berkelanjutan telah mendorong pelaku usaha untuk mematuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, sehingga risiko cemaran biologis, kimia, dan fisik dapat ditekan. Selain itu, peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya ketertelusuran (traceability) dan pencatatan produksi turut berkontribusi pada terjaminnya mutu produk perikanan primer yang dihasilkan.

2. Rekomendasi Rencana Aksi

Dalam rangka **mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja** Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. **Penguatan Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha**
Melanjutkan dan meningkatkan pembinaan teknis kepada pelaku usaha sektor produksi primer, khususnya penerapan **CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, dan CDOIB** pada perikanan budidaya serta **CPIB di kapal** pada perikanan tangkap, guna menjaga konsistensi pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan.
2. **Optimalisasi Pengawasan dan Verifikasi Kepatuhan**
Meningkatkan intensitas pengawasan, audit, dan verifikasi lapangan secara berkala untuk memastikan penerapan standar dilakukan secara berkelanjutan dan tidak bersifat administratif semata.
3. **Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan**
Mendorong peningkatan kompetensi petugas pengawas dan pendamping melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, serta penyegaran pemahaman regulasi terkait mutu dan keamanan pangan hasil perikanan.
4. **Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi**
Mengoptimalkan pemanfaatan data sertifikasi, hasil pengawasan, dan sistem informasi mutu untuk mendukung pengambilan keputusan, pemetaan risiko, serta penetapan prioritas pembinaan pada unit usaha yang belum sepenuhnya memenuhi standar.
5. **Perluasan Cakupan Unit Usaha Tersertifikasi**
Mendorong peningkatan jumlah dan cakupan unit usaha sektor produksi primer yang menerapkan dan memperoleh pengakuan standar mutu dan keamanan pangan, khususnya pada wilayah sentra produksi dan pelaku usaha skala kecil.
6. **Penguatan Koordinasi Lintas Pemangku Kepentingan**
Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, dan instansi terkait dalam rangka sinkronisasi kebijakan, pembinaan, serta pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan.

Foto Kegiatan :





2.3.2 SK.II.Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi : PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah. DI disampaikan dengan rumus sesuai dengan manual IKU

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Indikator Presentase Hasil kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

<i>Terselenggarannya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</i>							
<i>Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)</i>							
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025					Renstra BPPMHKP
TW I	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	%Capaian thd Target Renstra
0	0	70 %	0	0	70	0	70
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	%Capaian thd Target Renstra
0	0	70 %	94.51%	135.01%	70%	70%	70%
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK %	%Realisasi thd Target PK	%Capaian thd Target Renstra
0	0	70%	147,91	120%	70%	120	70%
TW IV	Target 2024	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Target PK %	%Realisasi thd Target PK	%Capaian thd Target Renstra
0	0	70%	125,04	120 %	70%	125,04	70%

1. Capaian IKU

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia, dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu : Pertama, fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 Sertifikasi HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing). Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertiikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP).

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Capaian ini berasal dari 15 UPI dari pengajuan penerbitan Sertifikat PMMT/ HACCP baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan. Berdasarkan peningkatan data yang signifikan terhadap ruang lingkup produk yang disertifikasi HACCP, menunjukkan terjadinya pengembangan jumlah produk yang diolah oleh UPI dan UPI juga telah merespon kebutuhan pasar untuk pengembangan jenis olahan dan kemasan eceran.

Capaian indikator diperoleh dengan menghitung rata-rata persentase capaian penerbitan sertifikat dari seluruh UPI Per triwulan

Tahun Tahunan Tahun 2025 IKU persentase HACCP yang terbit pada unit pengolahan ikan skala UMKM dan Menengah Besar tercapai 135.01 % dari target 65 sertifikat terealisasi 71 sertifikat.

Realisasi terhadap IKU persentase SKP yang terbit pada unit pengolahan ikan skala UMKM dan Menengah Besar Tahunantahun 2025 tercapai 79.78 % dengan jumlah sertifikat terbit sebanyak 150 dari 188 rekomendasi.

$$\% A = \frac{71}{65} \times 100\% = 109.23 \%$$

$$\% B = \frac{150}{188} \times 100\% = 79.78 \%$$

$$\% X = \frac{109.23 + 79.78}{2} \times 100\% = 94.51 \%$$

Kurangnya Sumberdaya Manusia kompeten yang dapat menjalankan tugas-tugas terkait jaminan mutu dan pengendalian mutu/ Inspektur Mutu yang memiliki Nomor Registrasi.

3. Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melaksanakan pengawasan rutin dan insidental pada unit usaha pasca panen selama TW III, khususnya pada kegiatan penanganan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi hasil perikanan, untuk memastikan penerapan standar mutu dan keamanan pangan tetap konsisten.
2. Melaksanakan pendampingan teknis secara terarah pada unit usaha pasca panen yang menjadi prioritas berdasarkan volume produksi, tingkat risiko, dan riwayat kepatuhan, guna menjaga kualitas produk hingga tahap distribusi.
3. Meningkatkan koordinasi teknis dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan instansi terkait selama TW III untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sektor pasca panen.

2.3.3. SK.III. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

$$x = \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Terselenggaranya pengendalian dan pengwasan mutu hasil kelautan dan perikanan

RASIO ESKPOR IKAN HASIL PERIKANAN YANG DI TERIMA OLEH NEGARA TUJUAN ESKPOR LINGKUP BALAI BESAR KIPM
JAKARTA I

Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025						Renstra BPPMHKP
TW I	Tagret 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd Target Restra
0	0	99	0	0	99	0	99	99
TW II	Tagret 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd Target Restra
0	0	99	100%	101,01	99	100%	99	99
TW III	Tagret 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd Target Restra
0	0	99	100%	100%	99	101,01	99	100
TW IV	Tagret 2024	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd Target Restra
0	0	99	100%	101,01	99	101,01	99	100

1. Capaian IKU

Indikator kinerja IKS.3 mengukur persentase penerimaan ekspor ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor sebagai cerminan pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan produk ekspor. **Target indikator ditetapkan sebesar 99%.**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada periode pelaporan, realisasi indikator **mencapai 100%**, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar **101,01%**. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ekspor ikan dan hasil perikanan dalam lingkup Balai Besar KIPM Jakarta **dapat diterima oleh negara tujuan ekspor sesuai ketentuan yang berlaku.**

Capaian indikator yang melampaui target tersebut mencerminkan **konsistensi penerapan standar mutu dan keamanan produk ekspor**, serta efektivitas pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi ekspor. Nilai capaian di atas target tidak menunjukkan kelebihan penghitungan, melainkan merupakan hasil dari tingkat penerimaan produk ekspor yang tinggi pada periode pelaporan.

Dengan demikian, indikator IKS.3 **telah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan**, serta memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran kinerja Balai Besar KIPM Jakarta.

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Capaian indikator IKS.3 yang mencapai **101,01%** dengan realisasi **100%** dari target **99%** menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan **telah berjalan efektif**. Tingginya tingkat penerimaan produk ekspor oleh negara tujuan mencerminkan **kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan mutu dan keamanan pangan**, serta konsistensi penerapan standar ekspor yang ditetapkan.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh:

1. **Penerapan standar mutu dan keamanan pangan secara konsisten** pada produk ekspor sejak tahap pra-ekspor hingga pengapalan.
2. **Pelaksanaan pengawasan dan verifikasi yang berkelanjutan** oleh Balai Besar KIPM Jakarta terhadap unit usaha dan komoditas ekspor.
3. **Koordinasi yang baik dengan pelaku usaha dan instansi terkait**, sehingga persyaratan negara tujuan dapat dipenuhi secara tepat waktu.
4. **Kesiapan dokumen dan data dukung ekspor** yang memadai, sehingga meminimalkan potensi penolakan di negara tujuan.

Rekomendasi Rencana Aksi:

1. Meningkatkan frekuensi dan kualitas pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan melalui perencanaan kegiatan yang lebih terstruktur dan berbasis risiko.
2. Mengoptimalkan kompetensi SDM pengawas mutu melalui pelatihan teknis dan pembaruan pemahaman terhadap regulasi serta standar mutu yang berlaku.
3. Memperkuat koordinasi internal dan eksternal dengan pelaku usaha serta instansi terkait guna memastikan kepatuhan terhadap persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana, prasarana, dan teknologi pendukung pengawasan mutu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil pengendalian dan pengawasan mutu sebagai dasar perbaikan berkelanjutan

Foto Kegiatan



Sasaran Kegiatan II

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik lingkup BKIPM, untuk mencapai sasaran kegiatan ini diperlukan dukungan 4 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan . adapun penjelasan pencapaian 9 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Presentnase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar
KIPM Jakarta I (100)

Index Profesional ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I
(87)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang
dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai Besar
KIPM Jakarta I (85)

Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar KIPM
Jakarta I (88)

2.3.4. SK.IV.Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar JAKARTA I

Dalam rangka mempertanggung jawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern; Indikator kinerja “Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)” dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA 2024 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi riil tahun 2024}} \times 100\%$$

Realisasi riil tahun 2024



Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh BPK yaitu :

Skala	Opini
5	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf)
3	WDP (Wajar dengan Pengecualian)
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP

Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025					Renstra BPPMHKP
TW I	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
100	100	0	0	0	0	87	100
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
100	100	0	0	0	0	87	100
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
100	100	0	0	0	0	87	100
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
100	100	0	0	0	0	87	100
TW IV	Target 2024	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
100	100	100	100	100	100	100	100

1. Capaian IKU

Persentase Penyelesaian Temuan BPK merupakan indikator yang mengukur tingkat efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai batas waktu yang ditetapkan. Indikator ini mencerminkan komitmen unit kerja dalam memperkuat tata kelola, akuntabilitas keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemantauan periode pelaporan, **capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK menunjukkan kinerja yang [baik/sangat baik/cukup]**, ditandai dengan **sebagian besar rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai** sesuai ketentuan. Capaian ini didukung oleh koordinasi intensif antara unit teknis, pejabat pengelola keuangan, dan aparat pengawasan internal, serta pemantauan berkala atas progres tindak lanjut. Namun demikian, **masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum sepenuhnya selesai**, terutama yang memerlukan proses administratif lanjutan, penyesuaian kebijakan internal, atau koordinasi lintas unit. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya capaian indikator secara keseluruhan, meskipun tidak mengurangi komitmen unit kerja dalam menyelesaikan seluruh temuan secara tuntas. Secara umum, capaian indikator ini telah **mendukung Sasaran Strategis peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan yang transparan**, serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam penguatan sistem pengendalian intern.

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Keberhasilan capaian **Persentase Penyelesaian Temuan BPK** didukung oleh meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Mekanisme pemantauan tindak lanjut yang dilakukan secara berkala telah mendorong percepatan penyelesaian temuan serta meminimalkan keterlambatan pelaporan progres kepada BPK. Selain itu, koordinasi yang efektif antara unit teknis, pengelola keuangan, dan aparat pengawasan internal berperan signifikan dalam memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara substansial, bukan hanya administratif. Peningkatan pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan pengendalian intern juga berkontribusi pada menurunnya jumlah temuan berulang, sehingga penyelesaian temuan berjalan lebih optimal.

Keberhasilan ini berdampak positif terhadap penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan, serta secara langsung mendukung **Sasaran Strategis peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi**. Capaian tersebut menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja penyelesaian temuan BPK pada periode berikutnya.

3. Rekomendasi Rencana Aksi

Menetapkan pemantauan rutin dan terjadwal atas seluruh rekomendasi BPK melalui dashboard/daftar kendali tindak lanjut, disertai penanggung jawab yang jelas pada setiap temuan untuk memastikan penyelesaian tepat waktu. meningkatkan intensitas koordinasi antara unit teknis, pengelola keuangan, dan aparat pengawasan internal dalam penyelesaian temuan yang bersifat lintas fungsi atau memerlukan penyesuaian kebijakan internal. Menyusun dan menerapkan SOP tindak lanjut temuan BPK yang memuat alur kerja, batas waktu, dan mekanisme pelaporan progres, guna memastikan keseragaman dan kepastian penyelesaian temuan. Melaksanakan bimbingan teknis atau sosialisasi secara berkala terkait pengelolaan keuangan, kepatuhan regulasi, dan pengendalian intern, khususnya bagi unit yang masih memiliki temuan belum selesai. Pencegahan Temuan Berulang Mengintegrasikan hasil evaluasi temuan BPK ke dalam perbaikan proses bisnis dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menurunkan risiko terjadinya temuan yang sama pada periode berikutnya. Penguatan Peran APIP Mengoptimalkan peran APIP dalam pendampingan dan revidasi atas tindak lanjut temuan BPK sebelum dilakukan pelaporan akhir, guna memastikan kualitas dan substansi penyelesaian temuan.

2.3.5. Indek Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Nilai Indeks

Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap Tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung Indeks Profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

1. Nilai diukur setiap Tahun dengan menggunakan 4 (Empat) dimensi, meliputi :
 - a. Dimensi Kualifikasi (25%) - mengukur kualifikasi pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
 - b. Dimensi Kompetensi (40%) - mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
 - c. Dimensi Kinerja (30%) - mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan
 - d. perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS;
 - e. Dimensi Disiplin (5%) - mengukur data / informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
 - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/ D-4 (Diploma Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-2 (Diploma Dua) / D-1 (Diploma Satu)/ SLTA/ Sederajat

Pendidikan di bawah SLTA dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	S-3	25
4	S-2	20
3	S-1 / D-IV	15
2	D-III	10
1	D-II / D-I / SLTA	5
0	SMP / SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/ Magang/Kursus/ sejenisnya.
4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
 - b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP);
5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan Laporan Kinerja _- Tahun 2024
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi :

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-*update* pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat Kepemimpinan sesuai dengan level
 - Jabatan terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu Tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;

IKK ini dihitung dari jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing- masing jawaban indikator.

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025						Renstra BPPMHKP 2020-2024
TW I	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
0	86	0	0	0	87	0	87	87
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
82,58	86	87	92,32	104,91	88	104,91	87	87
TW III	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
	86							
TW IV	Target 2024	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
86,07	86	82	84,89	103,52	82	103,52	82	82

1. Capaian IKU

Analisis Capaian Kinerja ASN

Berdasarkan hasil pemetaan kinerja, kualifikasi, kompetensi, dan disiplin terhadap ASN pada instansi ini, diperoleh gambaran capaian sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja

Secara umum, **capaian kinerja ASN tergolong tinggi**, dengan 10 dari 12 ASN memperoleh total IP ≥ 85 . Satu ASN berada pada kategori sedang (total IP 80).

2. Kualifikasi dan Kompetensi

- Mayoritas ASN memiliki pendidikan **S-1** (7 orang) dan **S-2** (3 orang), serta 2 ASN berpendidikan D-III.
- IP Kualifikasi rata-rata tinggi (20-25), menunjukkan tingkat pendidikan ASN cukup memadai.
- Pelaksanaan Diklat Fungsional dan Diklat Jabatan (JP) juga menunjukkan keikutsertaan aktif ASN dalam pengembangan kompetensi, meskipun beberapa ASN belum mengikuti Diklat Teknis atau PIM.

3. Disiplin

Semua ASN **tidak memiliki hukuman disiplin**, sehingga IP Disiplin maksimum tercapai. Hal ini menunjukkan kepatuhan dan integritas ASN tinggi, mendukung pencapaian kinerja secara keseluruhan.

PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, **Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan** memperoleh nilai kinerja **82,26** dengan kategori **TINGGI**, sedangkan **Balai Besar KIPM Jakarta I** memperoleh nilai **84,89** dengan kategori **TINGGI**. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua unit kerja berada pada level kinerja yang baik, namun **Balai Besar KIPM Jakarta I** memiliki **capaian lebih tinggi** dengan selisih nilai **2,63 poin**.

Secara komparatif, keunggulan Balai Besar KIPM Jakarta I terutama terlihat pada aspek **kompetensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan**, yang tercermin dari capaian indikator kinerja dan persentase realisasi yang lebih tinggi. Sementara itu, Sekretariat Badan menunjukkan keunggulan pada aspek **disiplin**, yang telah mencapai **100%**, serta stabilitas kinerja individu ASN dengan predikat “Baik”.

Gap kinerja antara kedua unit kerja tersebut mengindikasikan bahwa meskipun Sekretariat Badan telah mencapai kategori tinggi, kontribusi output dan outcome kegiatan terhadap sasaran strategis organisasi masih dapat ditingkatkan agar setara dengan unit kerja yang memiliki capaian lebih optimal, seperti Balai Besar KIPM Jakarta I.

BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	16	2312	92,48%	3177	79,42%	25	83,33%	5	100%	84,89	TINGGI
----------------------------	----	------	--------	------	--------	----	--------	---	------	-------	--------

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan,

1. Capaian Kinerja Tinggi

Balai Besar KIPM Jakarta I memperoleh nilai kinerja **84,89** dengan kategori **TINGGI**, menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif serta selaras dengan sasaran strategis organisasi.

2. Efektivitas Pelaksanaan Program

Tingginya capaian indikator kinerja dan persentase realisasi mencerminkan kemampuan unit kerja dalam mengelola kegiatan secara terencana dan berorientasi hasil.

3. Kinerja Individu ASN Stabil

Seluruh ASN memperoleh predikat kinerja “**Baik**” (83,33%), yang menunjukkan konsistensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

4. Disiplin ASN Sangat Baik

Tingkat disiplin mencapai **100%**, tanpa adanya hukuman disiplin, yang mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan dan budaya kerja yang profesional.

#	Nama	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan
		Tingkat Pendidikan	IP	Kinerja	Diklat PIM	Diklat Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20 JP	JP	Predikat Kinerja	IP	Hukuman Disiplin	IP		
1	INGGAR DWI WAHYUNI	S-1	25	20	10	-	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
2	MUJI DWI SAPTONO	S-2	25	20	-	10	-	0	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
3	NOVI SUSIANTI	S-2	25	20	-	10	-	0	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
4	NOVIANA DEWI	S-2	25	20	-	10	-	0	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
5	MOCHFAREZ DWI SENTANU	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
6	PRAMUDYANANTO	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
7	SUSIANA	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
8	YUNARI SIGIT PRAMONO	S-1	25	20	-	10	-	3.25	33.25	BAIK	25	0	5	88.25	TINGGI
9	KISMONO KUDOASMORO	S-1	20	20	-	10	-	0	30	BAIK	25	0	5	80	SEDANG
10	DONIE SAKTYA DHARMA	S-1	20	20	-	10	-	4.25	34.25	BAIK	25	0	5	84.25	TINGGI
11	GALIH PRATOMO SUWATNO	D-III	25	20	-	10	-	0	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
12	ARI NURYATMAN	D-III	25	20	-	10	-	0	30	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
13	SANDI NURCAHYO MUKTI WIRAWAN	D-III	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI

3. Rekomendasi Rencana Aksi

1. Penguatan Kompetensi dan Kapasitas SDM

Permasalahan: Kompetensi ASN belum sepenuhnya merata dan belum optimal mendukung peningkatan outcome kinerja.

Rencana Aksi:

- Menyusun **peta kebutuhan kompetensi jabatan** (competency mapping) sebagai dasar penetapan pelatihan.
- Mendorong keikutsertaan ASN pada **Diklat Teknis dan Diklat Kepemimpinan (PIM)** sesuai jenjang jabatan.
- Mengoptimalkan **pelatihan internal (in-house training)** dan *knowledge sharing* berbasis praktik kerja terbaik.

Rencana aksi ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi SDM, meningkatkan orientasi outcome program, serta mengoptimalkan pengendalian kinerja. Dengan implementasi rencana aksi secara konsisten, diharapkan kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I dapat meningkat secara berkelanjutan dan mendekati capaian kinerja optimal

Foto Kegiatan



SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor : B.268/6DA/RSDM.510/II/2025

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :

Nama : Dwi Wardani
NIP : 198201042014032001
Tempat Lahir : Cilacap
Tanggal Lahir : 4 Januari 1982
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda / IIIa
Jabatan : Pelaksana
Instansi : Balai Besar KIPM Jakarta I

Telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan :

Dasar - Dasar Implementasi Blue Economy di Sektor Kelautan dan Perikanan
oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode full e-learning meliputi 15 (lima belas) jam pelajaran (JP).



SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor : B.268/6DA/RSDM.510/II/2025

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :

Nama : Dwi Wardani
NIP : 198201042014032001
Tempat Lahir : Cilacap
Tanggal Lahir : 4 Januari 1982
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda / IIIa
Jabatan : Pelaksana
Instansi : Balai Besar KIPM Jakarta I

Telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan :

Dasar - Dasar Implementasi Blue Economy di Sektor Kelautan dan Perikanan
oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode full e-learning meliputi 15 (lima belas) jam pelajaran (JP).



2.3.6.SK.VI. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Presentnase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. Untuk unit kerja yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/ rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran. Untuk unit kerja level II yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran dan untuk kumulatif setahun maka diberi nilai maksimal target setiap triwulan.

Formula penghitungan IKK ini sebagai berikut :

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

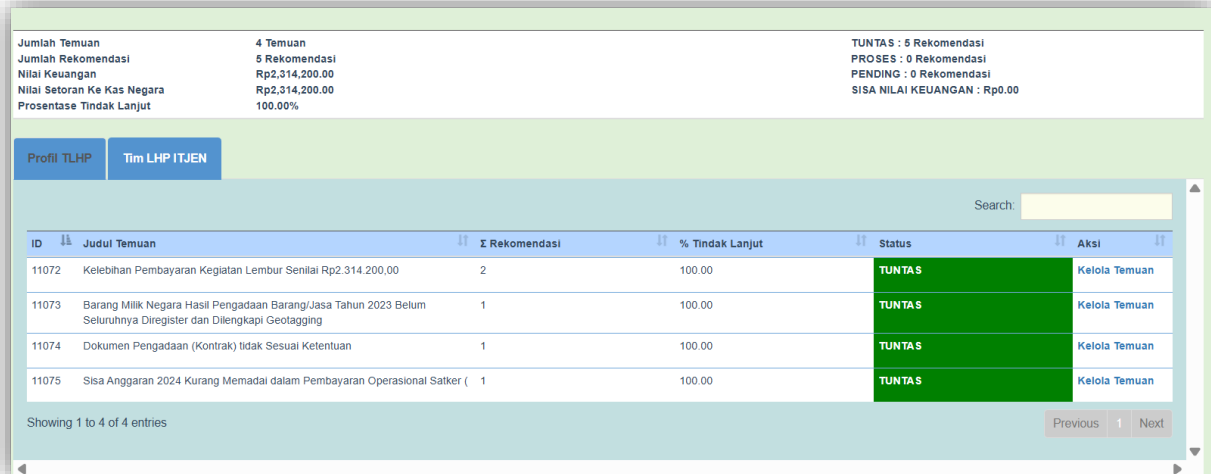
$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindak lanjuti oleh Balai Besar KIPM Jakarta I

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Balai Besar KIPM Jakarta I

$$\frac{\sum 0 t}{\sum 0} \times 100\%$$

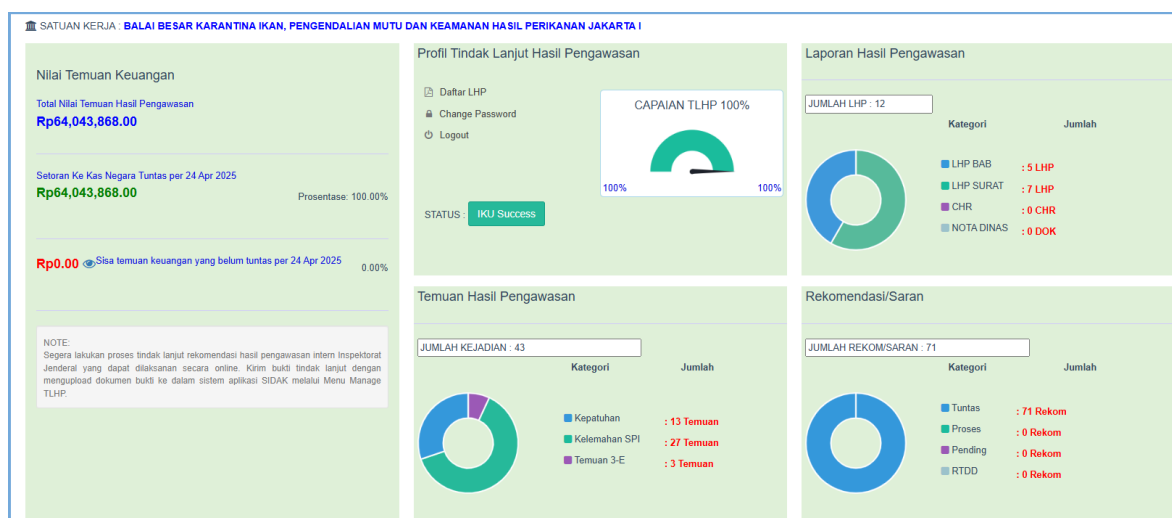
$\sum Nt = 0$ Temuan Irjen

$\sum N = 0$ Rekomendasi



Gambar 7. Dashboard Sidak Rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP

Dari 4 Temuan dan 6 Rekomendasi Irjen sesuai dengan Aplikasi sidak semua nya sudah di tindak lanjut semua sesuai dengan hasil pada aplikasi Sidak



Gambar 8. Dashboard Sidak Rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025					Revisi Renstra BPPMHKP 2020-2024
TW I	2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2025	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
100	120	85	100	117,65	85	85	100
TW II	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2025	Target PK 2025	%Capaian thd Target Restra
100	120	85	100	117,65	85	85	100
TW III	2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2025	Target PK 2025	%Capaian thd Target Restra
100	120	85	100	117,65	85	85	100
TW IV	2024	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Target PK 2025	Target PK 2025	%Capaian thd Target Restra
100	120	85	100	117,65	85	85	100

1. Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja

menunjukkan kinerja yang **baik**, ditandai dengan sebagian besar rekomendasi hasil pengawasan telah dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan proses bisnis dan peningkatan kinerja unit kerja. Pemanfaatan rekomendasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah diintegrasikan ke dalam rencana aksi dan pelaksanaan kegiatan, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan capaian kinerja dan penguatan akuntabilitas organisasi

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Keberhasilan pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan didukung oleh komitmen pimpinan dan unit kerja dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan kinerja. Integrasi rekomendasi ke dalam rencana aksi serta pemantauan berkala oleh APIP mendorong perubahan proses bisnis yang lebih efektif, sehingga rekomendasi pengawasan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan capaian kinerja dan akuntabilitas organisasi



3. Rekomendasi Rencana Aksi

Memperkuat integrasi rekomendasi hasil pengawasan ke dalam perencanaan dan rencana aksi kinerja unit kerja, menetapkan prioritas rekomendasi berdampak tinggi dengan penanggung jawab yang jelas, serta meningkatkan monitoring dan pendampingan APIP untuk memastikan pemanfaatan rekomendasi menghasilkan perbaikan proses bisnis dan peningkatan capaian kinerja yang berkelanjutan

2.3.7. SK.VII.Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai Besar KIPM Jakarta I

Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN RB Nomor 14/KEP/M.PAN RB/2017 yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang "relevan", "valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat yaitu :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Waktu pelayanan



Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4. Biaya/Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

Survei Kepuasan Masyarakat pada Balai Besar KIPM Jakarta I dilaksanakan selama

4 periode triwulan p dengan metode perhitungan nilai Survei Kepuasan Masyarakat yaitu dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9}$$

untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan.

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}}$$

Waktu Pelaksanaan SKM Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

NO	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Persiapan	Januari 2025	8
2	Pengumpulan Data	Januari-Maret 2025	60
3	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	April 2025	7
4	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	April 2025	7

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.63	3.60	3.63	3.63	3.67	3.52	3.52	3.59	3.57
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	89,92 (A atau Sangat Baik)								

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai Besar KIPM Jakarta I

Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025				Renstra BPPMHKP
TW I	2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2025	%Capaian thd Target Restra
84	0	88	89,92	102,18	88	88
TW II	2024	Target Tw II	Realisasi	% Capaian	Target PK 2025	%Capaian thd Target Restra
84	85,61	88	92,32	104,91	88	88
TW III	2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2025	%Capaian thd Target Restra
84	0	88	92,57	105,19	88	88
TW IV	2024	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Target PK 2025	%Capaian thd Target Restra
84	3,36	3,36	3,65	108,63	3,65	3,65

1. Capaian IKU

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan III mulai Januari hingga Maret 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Jakarta I secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 89.92. Kemudian nilai SKM Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Jakarta I menunjukkan sedikit penurunan tetapi tetap pada kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Triwulan I 2025 hingga tahunan 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kompetensi Pelayanan, Persyaratan dan waktu penyelesaian.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Biaya/Tarif dan Sarana dan Prasarana.

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. 2 (dua) unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Kompetensi Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,52. Selanjutnya Prilaku mendapatkan nilai 3,52 adalah nilai terendah Kedua.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Produk Layanan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,67. Selanjutnya Persayaratn, Waktu dan Biaya mendapatkan 3,63..

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Secara pelayanan sudah sangat baik, agar lebih meningkatkan mungkin di sarana”penunjang serta dengan di dukung anggaran yang memadai untuk meningkatkan pelayanan
- “Regulasi yang diacu lebih diperjelas”.
- “Respon lamban sekali”

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sarana dan Prasana merupakan penunjang dalam melaksanakan layanan, kedepan dengan dengan terbatasnya anggaran akan memaksimalkan dalam perbaikan sarana dan prasarana.
- Persyaratan kelengkapan dokumen sertifikasi sudah ditampilkan di ruang pelayanan, namun pengguna jasa cenderung bertanya secara langsung kepada petugas pelayanan.
- Kompetensi pelayanan perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti berbagai pelatihan terkait pelayanan publik terhadap Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat

Rekomendasi Rencana Aksi

- Meningkatkan Pelayanan baik kujungan kerja dan pelayanan
- Merencanakan kebutuhan pelayanan dan fasilitas yang di butuhkan



LAPORAN KINERJA TAHUNAN- TAHUN 2025

36	Balai KIPM Medan I	95,10	96,08	94,12	93,63	95,10	93,14	94,12	92,65	85,29	93,25	3,73	A	Sangat Baik	51	Online
37	Stasiun KIPM Bandung	94,35	93,55	91,94	92,74	93,55	93,55	91,13	92,74	91,94	92,83	3,71	A	Sangat Baik	31	Online
38	Balai KIPM Semarang	94,21	91,05	93,16	94,74	94,47	88,68	88,68	93,16	92,11	92,25	3,69	A	Sangat Baik	95	Online
39	Balai KIPM Manado	91,30	91,85	91,30	92,39	92,93	91,30	92,93	94,02	91,30	92,15	3,69	A	Sangat Baik	46	Online
40	Balai KIPM Lampung	93,18	93,18	93,18	89,39	91,67	93,18	90,91	94,70	89,39	92,09	3,68	A	Sangat Baik	33	Online
41	Stasiun KIPM Kupang	91,31	91,31	91,49	90,43	91,67	91,31	91,13	91,67	92,20	91,39	3,66	A	Sangat Baik	141	Online
42	Balai Besar KIPM Jakarta I	91,67	91,44	91,44	90,28	91,90	90,74	90,97	90,51	91,20	91,13	3,65	A	Sangat Baik	108	Online

REALISASI ANGGARAN

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	PAGU REALISASI	5,613,834,000 5,267,729,995 (93.83%)	3,481,427,000 3,354,304,284 (96.35%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	9,095,261,000 8,622,034,279 (94.80%)
		SISA	346,104,005	127,122,716	0	0	0	0	0	0	0	473,226,721
2	3989 Pengendalian Mutu	PAGU REALISASI	0 0.00%	142,568,000 57,012,000 (39.99%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	142,568,000 57,012,000 (39.99%)
		SISA	0	85,556,000	0	0	0	0	0	0	0	85,556,000
3	7010 Manajemen Mutu	PAGU REALISASI	0 0.00%	271,290,000 228,676,650 (84.29%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	271,290,000 228,676,650 (84.29%)
		SISA	0	42,613,350	0	0	0	0	0	0	0	42,613,350
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	5,613,834,000 5,267,729,995 (93.83%)	3,895,285,000 3,639,992,934 (93.45%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	9,509,119,000 8,907,722,929 (93.68%)
		SISA	346,104,005	255,292,066	0	0	0	0	0	0	0	601,396,071

Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan hasil pelaksanaan anggaran, realisasi belanja pada periode pelaporan mencapai **Rp8.907.722.929** dari total pagu anggaran sebesar **Rp9.509.119.000**, atau sebesar **93,68%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara **efektif dan efisien**, serta mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.

Realisasi belanja didominasi oleh **belanja pegawai dan belanja barang**, yang mendukung secara langsung pelaksanaan kegiatan utama satuan kerja, khususnya pada kegiatan **Dukungan Manajemen Internal**, yang mencatat tingkat realisasi tertinggi sebesar **94,28%**. Tingginya penyerapan anggaran pada kegiatan tersebut menunjukkan optimalnya dukungan manajerial dan operasional dalam menunjang pencapaian sasaran strategis organisasi.

Sementara itu, kegiatan **Manajemen Mutu** terealisasi sebesar **84,29%**, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai rencana, meskipun masih terdapat sisa anggaran akibat efisiensi pelaksanaan dan penyesuaian kebutuhan operasional. Adapun kegiatan **Pengendalian Mutu** menunjukkan tingkat realisasi yang relatif rendah sebesar **39,99%**, yang disebabkan oleh belum terlaksananya seluruh kegiatan sesuai jadwal perencanaan atau adanya penyesuaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran telah mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama satuan kerja. Sisa anggaran yang masih terdapat pada akhir periode akan menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya, agar selaras dengan prinsip **akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang efektif**.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Capaian realisasi anggaran sebesar **93,68%** menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan **sesuai rencana dan target yang ditetapkan**. Keberhasilan ini terutama didukung oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan **Dukungan Manajemen Internal**, yang memiliki tingkat realisasi tertinggi (**94,28%**). Hal tersebut mencerminkan perencanaan anggaran yang relatif tepat, kelancaran proses administrasi, serta efektivitas pengelolaan belanja pegawai dan belanja barang dalam mendukung operasional dan pencapaian sasaran strategis satuan kerja.

Selain itu, kegiatan **Manajemen Mutu** juga menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan realisasi **84,29%**, yang menandakan sebagian besar output kegiatan telah tercapai dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan dan tata kelola organisasi.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Peningkatan Kualitas Perencanaan Kegiatan**
Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih realistis dan berbasis kebutuhan riil, termasuk penajaman target output dan jadwal pelaksanaan sejak awal tahun anggaran, guna meminimalkan potensi keterlambatan dan sisa anggaran.
- Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas**
Melaksanakan kegiatan utama dan berisiko tinggi terhadap rendahnya penyerapan anggaran, khususnya pada kegiatan **Pengendalian Mutu**, sejak triwulan awal agar pelaksanaan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
- Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berkala**
Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan) untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan korektif secara tepat waktu.
- Optimalisasi Koordinasi dan Pengendalian Internal**
Memperkuat koordinasi antarunit kerja dan fungsi pengelola anggaran guna mengantisipasi perubahan kebijakan serta mengatasi hambatan teknis yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan.
- Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran**
Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien tanpa mengurangi kualitas output, sehingga sisa anggaran yang terjadi merupakan hasil efisiensi dan bukan akibat keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan.



Efisiensi

Perhitungan Efisiensi

Pagu Anggaran
Rp9.509.119.000

Realisasi Anggaran
Rp8.907.722.929

Sisa Anggaran (Efisiensi)
Rp601.396.071

Perhitungan

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{9.509.119.000 - 8.907.722.929}{9.509.119.000} \times 100\% \\ &= \frac{601.396.071}{9.509.119.000} \times 100\% \\ &= \mathbf{6,32\%}\end{aligned}$$

3. Interpretasi Efisiensi

Efisiensi anggaran sebesar **6,32%** menunjukkan adanya **penghematan anggaran** dalam pelaksanaan program dan kegiatan tanpa mengurangi capaian output yang telah ditetapkan. Efisiensi tersebut mencerminkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya serta pengendalian pelaksanaan anggaran yang efektif.

4. Kesimpulan

- Penyerapan: **93,68% (sangat baik)**
- Efisiensi: **6,32% (efisiensi positif)**

PENUTUP

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, capaian kinerja seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar KIPM Jakarta **menunjukkan hasil yang baik dan melampaui target yang telah ditetapkan**. IKU sektor produksi pasca panen (IKSK.2) mencapai capaian kinerja **120%** setelah pembatasan nilai maksimum (capping), dengan realisasi sebesar **147,91%** dari target **70%**, sedangkan IKU rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima negara tujuan (IKSK.3) mencapai capaian **101,01%** dengan realisasi **100%** dari target **99%**.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa **pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian mutu serta keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan telah berjalan efektif**, baik pada sektor produksi pasca panen maupun pada kegiatan ekspor. Tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan persyaratan negara tujuan ekspor turut mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja.

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, **upaya penguatan pengawasan, peningkatan kualitas data, dan pembinaan pelaku usaha tetap perlu dilaksanakan secara berkelanjutan** untuk menjaga konsistensi kinerja dan mengantisipasi potensi risiko yang berasal dari perubahan regulasi, dinamika pasar, dan faktor eksternal lainnya.

Dengan demikian, secara agregat **kinerja Balai Besar KIPM Jakarta berada pada kategori sangat baik**, serta telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi sesuai dengan ketentuan perencanaan dan pengukuran kinerja yang berlaku.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi total sebesar **56,38%**, ditandai oleh sisa anggaran yang masih tersedia dari total pagu yang ditetapkan. Realisasi anggaran mencapai **43,62%**, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan awal namun belum sepenuhnya optimal dalam hal penyerapan.

Capaian penyerapan tertinggi terdapat pada **Dukungan Manajerial**, yang menunjukkan kesiapan pelaksanaan dan dukungan operasional yang relatif lebih baik. Sementara itu, **Produksi Pasca Panen** dan **Sektor Produksi Primer** masih memerlukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar target kinerja dan penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun efisiensi anggaran telah tercapai dengan baik, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan pengendalian dan monitoring agar seimbang

Rekomendasi

1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan khususnya pada **Sektor Produksi Primer dan Produksi Pasca Panen** melalui penjadwalan ulang kegiatan, penyederhanaan proses administrasi, serta percepatan pengadaan agar penyerapan anggaran dapat lebih optimal.
2. **Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran**
Memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan riil dan jadwal pelaksanaan yang lebih akurat guna meminimalkan deviasi antara pagu dan realisasi serta meningkatkan keterkaitan antara alokasi anggaran dan target kinerja.
3. **Penguatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)**
Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terukur untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan sejak dini serta memastikan tindak lanjut atas hasil evaluasi dapat segera dilakukan.
4. **Optimalisasi Koordinasi dan Sinergi Pelaksana**
Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dan pelaksana kegiatan guna memastikan kesiapan teknis, administrasi, dan dukungan sumber daya sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai rencana.
5. **Pemanfaatan Efisiensi Secara Produktif**
Mengarahkan sisa anggaran hasil efisiensi untuk mendukung kegiatan prioritas atau peningkatan kualitas output, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Peningkatan Kapasitas SDM Pelaksana**
Mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pembinaan teknis dan manajerial agar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
7. **Menjaga Konsistensi Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan**
Memastikan penerapan standar mutu dan keamanan pangan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan pada seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pasca panen hingga ekspor, guna menjaga stabilitas capaian kinerja.
8. **Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko**
Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko, khususnya pada unit usaha, komoditas, dan negara tujuan ekspor yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi.
9. **Peningkatan Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha**
Melanjutkan pembinaan dan pendampingan teknis secara terarah kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha baru dan skala kecil, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu dan persyaratan ekspor.
10. **Penguatan Kualitas Data dan Akuntabilitas Kinerja**
Meningkatkan kualitas pencatatan, verifikasi, dan validasi data dukung IKU agar pengukuran kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara akurat, transparan, dan sesuai ketentuan.
11. **Antisipasi Perubahan Regulasi dan Dinamika Eksternal**
Melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan regulasi nasional maupun persyaratan negara tujuan ekspor sebagai langkah antisipatif terhadap potensi risiko penurunan capaian kinerja.
12. **Evaluasi Berkala sebagai Dasar Perbaikan Berkelanjutan**
Melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.





LAPORAN KINERJA TAHUNAN- TAHUN 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target JUNI	Capaian JUNI	%	Target s/d JUNI	Capaian s/d JUNI	%
SK.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						113,67			113,67	
IKSK.1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	100	120	70	100	120
IKSK.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	95,51	120	70	95,51	120
IKSK.3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta Data Dukung1	Persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	99	99	100	101,01	99	100	101,01
SK.03	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						111,23			111,23	
IKSK.03.1	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I	Persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0			0	0	
IKSK.03.2	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I Data Dukung1	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87	75	83,34	111,12	75	83,34	111,12
IKSK.03.4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85	85	100	117,65	85	100	117,65
IKSK.03.5	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88	88	92,32	104,91	88	92,32	104,91

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.bkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN JAKARTA I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Anggoro**
Jabatan : **Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Balai Besar Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Jakarta I



Sri Angoro

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN JAKARTA I**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
	2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
	3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	99
SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	100
	5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Nilai)	87
	6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	85
	7. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.917.575.849
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	177.500.000
Total Anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2025		6.095.075.849

Tangerang, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Balai Besar Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Jakarta I



Sri Angoro



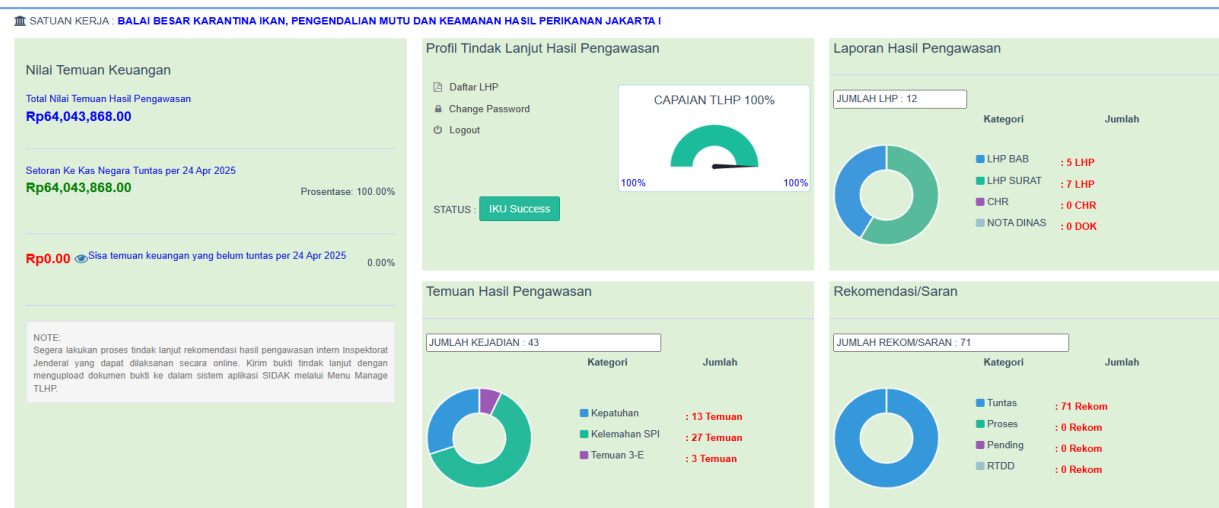
LAPORAN KINERJA TAHUNAN- TAHUN 2025

Jumlah Temuan	4 Temuan	TUNTAS : 5 Rekomendasi
Jumlah Rekomendasi	5 Rekomendasi	PROSES : 0 Rekomendasi
Nilai Keuangan	Rp2,314,200.00	PENDING : 0 Rekomendasi
Nilai Setoran Ke Kas Negara	Rp2,314,200.00	SISA NILAI KEUANGAN : Rp0.00
Prosentase Tindak Lanjut	100.00%	

Profil TLHP	Tim LHP ITJEN
-------------	---------------

ID	Judul Temuan	Σ Rekomendasi	% Tindak Lanjut	Status	Aksi
11072	Kelebihan Pembayaran Kegiatan Lembur Senilai Rp2.314.200,00	2	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
11073	Barang Milik Negara Hasil Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 Belum Seluruhnya Diregister dan Dilengkapi Geotagging	1	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
11074	Dokumen Pengadaan (Kontrak) tidak Sesuai Ketentuan	1	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
11075	Sisa Anggaran 2024 Kurang Memadai dalam Pembayaran Operasional Satker (	1	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan

Showing 1 to 4 of 4 entries





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kinerjaku Home

Kamis, 29 Januari 2026

Unit:

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN

Tahun:

2025

Tampilkan

TW1



TW2



TW3



TW4



Jenis	TW1	TW2	s/d TW2	TW3	s/d TW3	TW4
Skor Capaian	109.92	112.45	112.45	112.55	112.55	110.56
Skor Ventilasi	109.92 Q	110.07 Q	110.07	109.55 Q	109.55	108.56 Q

Legend

110 - 120 (Istimewa)

90 - 110 (Baik)

70 - 90 (Cukup)

50 - 70 (Kurang)

REKAPITULASI SERTIFIKAT PENERAPAN HACCP
BALAI BESAR KIPM JAKARTA I
TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	NAMA UPI	ALAMAT	PRODUK	STATUS PRODUK	GRADE	NO. SERTIFIKAT HACCP	TGL. TERBIT	BERLAKU SAMPAI	LAMA TERBIT	STATUS SERTIFIKAT
1	AGARINDO BOGATAMA, PT	Jl. Raya Pasar Kamis Km. 06, Kel. Sukamantri, Kec. Pasar Kamis, Kabupaten Tangerang, Banten - Indonesia	Agar-Agar Powder	Perpanjangan	A	105/PMHACCP/K08/25	09-Sep-25	09-Sep-27	5 hari	BERLAKU
2	ALAM LAUT, CV	Pergudangan Bandara Mas Blok M No. 20, Kel. Selapajang Jaya, Kec. Neglesari, Kota Tangerang, Banten - Indonesia	Fresh Stingray	Perpanjangan	C	104/PMHACCP/S08/25	18 AGS 2025	18 AGS 2027	5 hari	BERLAKU
3	ALAMSEGAR JAYA, PT	Jl. Kosambi Perancis Permai Blok L, No. 15, 15A, 16, Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten - Indonesia	Frozen Squillamantis	Perpanjangan	C	105/PMHACCP/PB/08/25	18 AGS 2025	18 AGS 2027	5 hari	BERLAKU
4	ANDALAN NELAYAN INDONESIA, PT	Jl. Raya Narogong KM 28.5, RT.017/RW.005, Desa Kelurahan Kembang Kuning, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor, West Java - Indonesia	Frozen Cephalopods	Perpanjangan	B	302/PMHACCP/PB/07/25	30-Jul-25	30-Jul-27	5 hari	BERLAKU
5	BAHAR BERSAUDARA BERJAYA, PT	Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok O No. 14, Jl. Perancis No. 1, Desa Kelurahan Belimbing, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten - Indonesia	Frozen Demersal Fish	Perpanjangan	B	303/PMHACCP/PB/07/25	30-Jul-25	30-Jul-27	5 hari	BERLAKU
6	BAHARI PRIMA MANUNGAL, PT	Jl. Bakti Mulya 2 No. 58 Kel. Tegay Alur, Kec. Kalideres, West Jakarta - Indonesia	Frozen Pelagic Fish	Perpanjangan	B	304/PMHACCP/PB/07/25	30-Jul-25	30-Jul-27	5 hari	BERLAKU
7	FRESH ON TIME SEAFOOD, PT	Jl. Raya Narogong Km 28.5 Kawasan Industri Kembang Kuning, Kel. Kembang Kuning, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, West Java - Indonesia	Frozen Cooked Shellfish	Penambahan Ruang Lingkup	A	122/PMHACCP/PB/09/25	10-Sep-25	10-Sep-27	4 hari	BERLAKU
8	GLOBAL BAHAN PANGAN, PT	Kampung Kojan RT.007 RW.006, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta - Indonesia	Frozen Crab	Perpanjangan	A	123/PMHACCP/PB/08/25	10-Sep-25	10-Sep-27	4 hari	BERLAKU
9	HYDROCOLLOID INDONESIA, PT	Kawasan Industri Brantamulya Kp. Babakan RT. 04 RW.02 Desa Terikolot, Kec. Cikurup, Kab. Bogor, West Java - Indonesia	Frozen Demersal Fish	Naik Grade	B	280/PMHACCP/PB/07/25	29-Jul-25	29-Jul-27	4 hari	BERLAKU
10	IKANDI LAUT INDONESIA, CV	Pergudangan Mullara Kosambi 2 Jl. Raya Perancis Blok B3 No. 01 Desa Kelurahan Banda, Kec. Banda, Kota Tangerang, Banten - Indonesia	Frozen Fish Roe	Penambahan Ruang Lingkup	A	123/PMHACCP/PB/08/25	21 AGS 2025	21 AGS 2027	6 hari	BERLAKU
11	INDO BAHARI LESTARI, PT	Pergudangan Kosambi Megah Blok A 14 Jl. Raya Perancis Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Banten - Indonesia	Frozen Pasteurized Crabmeat	Penambahan Ruang Lingkup	B	281/PMHACCP/PB/07/25	29-Jul-25	29-Jul-27	4 hari	BERLAKU
			Live Lobster	Baru	B	172/PMHACCP/PH/07/25	22-Jul-25	22-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Live Shell	Baru	B	173/PMHACCP/PH/07/25	17-Jul-25	17-Jul-27	3 hari	BERLAKU
			Live Shrimp	Baru	B	171/PMHACCP/PH/07/25	22-Jul-25	22-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Live Slipper Lobster	Baru	B	172/PMHACCP/PH/07/25	22-Jul-25	22-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Live Snail	Baru	B	175/PMHACCP/PH/07/25	17-Jul-25	17-Jul-27	3 hari	BERLAKU
			Live Squillamantis	Baru	B	173/PMHACCP/PH/07/25	22-Jul-25	22-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Live Swimming Crab	Baru	B	176/PMHACCP/PH/07/25	17-Jul-25	17-Jul-27	3 hari	BERLAKU
			Fresh Demersal Fish	Perpanjangan	B	301/PMHACCP/PS/08/25	30-Sep-25	30-Sep-27	3 hari	BERLAKU
			Fresh Pelagic Fish	Perpanjangan	B	302/PMHACCP/PS/08/25	30-Sep-25	30-Sep-27	3 hari	BERLAKU
			Frozen Demersal Fish	Perpanjangan	B	303/PMHACCP/PB/08/25	30-Sep-25	30-Sep-27	3 hari	BERLAKU
			Frozen Pelagic Fish	Perpanjangan	B	304/PMHACCP/PB/08/25	30-Sep-25	30-Sep-27	3 hari	BERLAKU
			Frozen Crab	Perpanjangan	A	303/PMHACCP/PB/08/25	29-Sep-25	29-Sep-27	3 hari	BERLAKU
			Frozen Fish Roe	Penambahan Ruang Lingkup	A	024/PMHACCP/PB/08/25	01-Sep-25	01-Sep-27	5 hari	BERLAKU
			Frozen Lobster	Penambahan Ruang Lingkup	A	025/PMHACCP/PB/08/25	01-Sep-25	01-Sep-27	5 hari	BERLAKU
			Frozen Pasteurized Crabmeat	Perpanjangan	A	304/PMHACCP/PB/09/25	29-Sep-25	29-Sep-27	3 hari	BERLAKU
			Pasteurized Crabmeat	Perpanjangan	A	385/PMHACCP/PL/08/25	29-Sep-25	29-Sep-27	3 hari	BERLAKU
			Sterilized Canned Shrimp	Perpanjangan	A	386/PMHACCP/PL/08/25	29-Sep-25	29-Sep-27	3 hari	BERLAKU
			Frozen Demersal Fish	Baru	B	231/PMHACCP/PB/08/25	29 AGS 2025	29 AGS 2027	5 hari	BERLAKU
			Frozen Lobster	Baru	B	232/PMHACCP/PB/08/25	29 AGS 2025	29 AGS 2027	5 hari	BERLAKU
			Frozen Pelagic Fish	Baru	B	233/PMHACCP/PB/08/25	29 AGS 2025	29 AGS 2027	5 hari	BERLAKU
			Frozen Squillamantis	Baru	B	234/PMHACCP/PB/08/25	29 AGS 2025	29 AGS 2027	5 hari	BERLAKU
			Semi Refined Carrageenan	Perpanjangan	A	32/PMHACCP/PK/07/25	24-Jul-25	24-Jul-27	3 hari	BERLAKU
			Live Crab	Perpanjangan	C	304/PMHACCP/PH/07/25	09-Jul-25	09-Jul-27	5 hari	BERLAKU
			Live Grouper	Perpanjangan	C	305/PMHACCP/PH/07/25	09-Jul-25	09-Jul-27	5 hari	BERLAKU
			Live Lobster	Perpanjangan	C	071/PMHACCP/PH/07/25	10-Jul-25	10-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Live Shell	Perpanjangan	C	072/PMHACCP/PH/07/25	10-Jul-25	10-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Live Snail	Perpanjangan	C	073/PMHACCP/PH/07/25	10-Jul-25	10-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Live Squillamantis	Perpanjangan	C	074/PMHACCP/PH/07/25	10-Jul-25	10-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Live Grouper	Baru	C	284/PMHACCP/PH/07/25	30-Jul-25	30-Jul-27	5 hari	BERLAKU
			Live Squillamantis	Baru	C	285/PMHACCP/PH/07/25	30-Jul-25	30-Jul-27	5 hari	BERLAKU



LAPORAN KINERJA TAHUNAN- TAHUN 2025

12	INDO SAMUDRA NUSANTARA, PT	Jl. Kampung Pisang, No. 10A, RT. 001 RW. 014, Kelurahan Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten - Indonesia	Live Crab	Perparjangan	B	42	208/PMHACCP/PH07/25	23-Jul-25	23-Jul-27	5 hari	BERLAKU
			Live Crayfish	Penambahan Ruang Lingkup	B	43	209/PMHACCP/PH07/25	23-Jul-25	23-Jul-27	5 hari	BERLAKU
			Live Demersal Fish	Penambahan Ruang Lingkup	B	44	266/PMHACCP/PH07/25	24-Jul-25	24-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Live Freshwater Fish	Penambahan Ruang Lingkup	B	45	287/PMHACCP/PH07/25	24-Jul-25	24-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Live Lobster	Perparjangan	B	46	210/PMHACCP/PH07/25	23-Jul-25	23-Jul-27	5 hari	BERLAKU
			Live Moa	Penambahan Ruang Lingkup	B	47	288/PMHACCP/PH07/25	24-Jul-25	24-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Live Shellfish	Perparjangan	B	48	289/PMHACCP/PH07/25	24-Jul-25	24-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Live Snail	Penambahan Ruang Lingkup	B	49	290/PMHACCP/PH07/25	24-Jul-25	24-Jul-27	6 hari	BERLAKU
13	INDONESIA BAHARI LESTARI, PT	Jl. Raya Narogong KM 26,5, Kel. Kembang Kuning, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor, West Java - Indonesia	Live Squillamantis	Penambahan Ruang Lingkup	B	50	211/PMHACCP/PH07/25	23-Jul-25	23-Jul-27	5 hari	BERLAKU
			Frozen Surimi	Naik Grade	A	51	176/PMHACCP/PH08/25	26 AGS 2025	26 AGS 2027	5 hari	BERLAKU
14	JASUMA, CV	Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok E-9, Jl. Raya Prancis, Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten - Indonesia	Frozen Cephalopods	Perparjangan	B	52	379/PMHACCP/PH09/25	29-Sep-25	29-Sep-27	5 hari	BERLAKU
			Frozen Demersal Fish	Perparjangan	B	53	380/PMHACCP/PH09/25	29-Sep-25	29-Sep-27	5 hari	BERLAKU
			Frozen Pelagic Fish	Perparjangan	B	54	381/PMHACCP/PH09/25	29-Sep-25	29-Sep-27	5 hari	BERLAKU
15	JAYA SAMUDRA PACIFIC, PT	Jalan Mangga Ubi No. 18, Kelurahan Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta - Indonesia	Dried Salted Fish	Baru	B	55	084/PMHACCP/PH07/25	16-Jul-25	10-Jul-27	5 hari	BERLAKU
			Dried Shark	Baru	B	56	085/PMHACCP/PH07/25	16-Jul-25	10-Jul-27	5 hari	BERLAKU
			Dried Shrimp	Baru	B	57	086/PMHACCP/PH07/25	16-Jul-25	10-Jul-27	5 hari	BERLAKU
			Dried Stingray	Baru	B	58	087/PMHACCP/PH07/25	16-Jul-25	10-Jul-27	5 hari	BERLAKU
16	KML ICHMASA FOODS, PT	Jl. Lambau (Kawasan Propindo Gamilang) Kp. Babakan Rawa Haur No.02 RT 004 RW 006, Kel. Santul, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, West Java - Indonesia	Frozen Imitation Crab Stick	Perparjangan	A	59	167/PMHACCP/PH09/25	15-Sep-25	15-Sep-27	5 hari	BERLAKU
17	LAUKITA BERSAMA INDONESIA, PT	Jl. Padat Karya Kampung Pabuaran RT/RW. 07/06, Desa/Kelurahan Cungug Kulon, Kec. Cungug, Kab. Tangerang, Banten - Indonesia	Roasted Nori	Baru	A	60	212/PMHACCP/PH09/25	18-Sep-25	18-Sep-27	6 hari	BERLAKU
18	MAKSIMA MINA AXIA, PT	Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok L No. 06, Kel. Jati Mulya, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten - Indonesia	Fresh Cephalopods	Perparjangan	B	61	093/PMHACCP/PH09/25	04-Sep-25	04-Sep-27	3 hari	BERLAKU
			Fresh Demersal Fish	Perparjangan	B	62	094/PMHACCP/PH09/25	04-Sep-25	04-Sep-27	3 hari	BERLAKU
			Fresh Pelagic Fish	Perparjangan	B	63	089/PMHACCP/PH09/25	04-Sep-25	04-Sep-27	3 hari	BERLAKU
			Fresh Tuna	Perparjangan	B	64	090/PMHACCP/PH09/25	04-Sep-25	04-Sep-27	3 hari	BERLAKU
			Frozen Demersal Fish	Perparjangan	B	65	095/PMHACCP/PH09/25	04-Sep-25	04-Sep-27	3 hari	BERLAKU
			Frozen Pelagic Fish	Perparjangan	B	66	091/PMHACCP/PH09/25	04-Sep-25	04-Sep-27	3 hari	BERLAKU
			Frozen Tuna	Perparjangan	B	67	092/PMHACCP/PH09/25	04-Sep-25	04-Sep-27	3 hari	BERLAKU
			Dried Cephalopods	Perparjangan	B	68	255/PMHACCP/PH07/25	24-Jul-25	24-Jul-27	6 hari	BERLAKU
19	MINA JAYA WYSA, PT	Jl. Pergudangan Bandara Mas Blok T 11, Kel. Kedauung Wetan, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten Indonesia	Dried Sea Cucumber	Perparjangan	B	69	296/PMHACCP/PH07/25	24-Jul-25	24-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Dried Shrimp	Perparjangan	B	70	257/PMHACCP/PH07/25	24-Jul-25	24-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Fresh Cephalopods	Perparjangan	B	71	276/PMHACCP/PH07/25	29-Jul-25	29-Jul-27	3 hari	BERLAKU
			Fresh Crustacea	Perparjangan	B	72	265/PMHACCP/PH07/25	29-Jul-25	29-Jul-27	9 hari	BERLAKU
			Fresh Demersal Fish	Perparjangan	B	73	277/PMHACCP/PH07/25	29-Jul-25	29-Jul-27	3 hari	BERLAKU
			Fresh Freshwater Fish	Perparjangan	B	74	278/PMHACCP/PH07/25	29-Jul-25	29-Jul-27	3 hari	BERLAKU
			Fresh Pelagic Fish	Perparjangan	B	75	279/PMHACCP/PH07/25	29-Jul-25	29-Jul-27	3 hari	BERLAKU
			Fresh Shell	Perparjangan	B	76	266/PMHACCP/PH07/25	29-Jul-25	29-Jul-27	9 hari	BERLAKU
			Fresh Shrimp	Perparjangan	B	77	267/PMHACCP/PH07/25	29-Jul-25	29-Jul-27	9 hari	BERLAKU
			Fresh Snail	Perparjangan	B	78	288/PMHACCP/PH07/25	29-Jul-25	29-Jul-27	9 hari	BERLAKU
			Frozen Cephalopods	Perparjangan	B	79	025/PMHACCP/PH08/25	06 AGS 2025	06 AGS 2027	4 hari	BERLAKU
			Frozen Demersal Fish	Perparjangan	B	80	026/PMHACCP/PH08/25	06 AGS 2025	06 AGS 2027	4 hari	BERLAKU
			Frozen Pelagic Fish	Perparjangan	B	81	027/PMHACCP/PH08/25	06 AGS 2025	06 AGS 2027	4 hari	BERLAKU
			Frozen Sand Goby	Perparjangan	B	82	028/PMHACCP/PH08/25	06 AGS 2025	06 AGS 2027	4 hari	BERLAKU
			Live Crab	Perparjangan	B	83	251/PMHACCP/PH07/25	24-Jul-25	24-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Live Demersal Fish	Perparjangan	B	84	252/PMHACCP/PH07/25	24-Jul-25	24-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Live Eel	Perparjangan	B	85	145/PMHACCP/PH09/25	16-Sep-25	16-Sep-27	6 hari	BERLAKU
			Live Freshwater Lobster	Perparjangan	B	86	156/PMHACCP/PH09/25	16-Sep-25	16-Sep-27	6 hari	BERLAKU
			Live Lobster	Perparjangan	B	87	283/PMHACCP/PH07/25	24-Jul-25	24-Jul-27	6 hari	BERLAKU
			Live Sand Goby	Perparjangan	B	88	157/PMHACCP/PH09/25	16-Sep-25	16-Sep-27	6 hari	BERLAKU



LAPORAN KINERJA TAHUNAN- TAHUN 2025

21	MUARA LAUT, CV	Kompleks Pergudangan Mulara Kosambi I Blok A-5, No.11, Desa Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten - Indonesia	Live Shell	Perpanjangan	B	89	254.PMHACCPPH07/25	24-Jul-25	24-Jul-27	6 hari	BERLAJU
			Live Snail	Perpanjangan	B	90	146.PMHACCPPH09/25	16-Sep-25	16-Sep-27	6 hari	BERLAJU
			Live Softshell Turtle	Perpanjangan	B	91	147.PMHACCPPH09/25	16-Sep-25	16-Sep-27	6 hari	BERLAJU
			Live Squidamitis	Perpanjangan	B	92	148.PMHACCPPH09/25	16-Sep-25	16-Sep-27	6 hari	BERLAJU
22	MUTIARA SHUNYI, CV	Jl. Masekal Suryadharma, Pergudangan Bandara Mas Blok D No. 21, Kel. Selapajang Jaya, Kec. Naglasari, Kota Tangerang, Banten Indonesia	Fresh Demersal Fish	Perpanjangan	B	93	106.PMHACCPPB/09/25	09-Sep-25	09-Sep-27	4 hari	BERLAJU
			Fresh Fish Roe	Perpanjangan	B	94	107.PMHACCPPB/09/25	09-Sep-25	09-Sep-27	4 hari	BERLAJU
			Fresh Pelagic Fish	Perpanjangan	B	95	108.PMHACCPPB/09/25	09-Sep-25	09-Sep-27	4 hari	BERLAJU
			Fresh Sea Cucumber	Perpanjangan	B	96	125.PMHACCPPB/09/25	10-Sep-25	10-Sep-27	6 hari	BERLAJU
23	PRIMATARA PERKASSA, PT	Jl. Raya Perancis Pergudangan 75 Blok F No. 3-4 RT 04/08, Kel. Banda, Kec. Banda, Kota Tangerang, Banten - Indonesia	Fresh Shellfish Meat	Perpanjangan	B	97	109.PMHACCPPB/09/25	09-Sep-25	09-Sep-27	4 hari	BERLAJU
			Fresh Shrimp	Perpanjangan	B	98	126.PMHACCPPB/09/25	10-Sep-25	10-Sep-27	5 hari	BERLAJU
			Live Eel	Penambahan Ruang Lingkup	B	99	236.PMHACCPPH08/25	29 AGS 2025	29 AGS 2027	5 hari	BERLAJU
			Live Mos	Perpanjangan	B	100	240.PMHACCPPH08/25	29 AGS 2025	29 AGS 2027	5 hari	BERLAJU
24	PRISSANT DELI KRISP, PT	Jl. Raya Perancis Pergudangan 75 Blok F No. 3-4 RT 04/08, Kel. Banda, Kec. Banda, Kota Tangerang, Banten - Indonesia	Live Softshell Turtle	Perpanjangan	B	101	241.PMHACCPPH08/25	29 AGS 2025	29 AGS 2027	5 hari	BERLAJU
			Dried Salted Fish	Perpanjangan	C	102	020.PMHACCPBK07/25	03-Jul-25	03-Jul-27	5 hari	BERLAJU
			Dried Shark	Penambahan Ruang Lingkup	C	103	198.PMHACCPBK07/25	22-Jul-25	22-Jul-27	4 hari	BERLAJU
			Dried Stingray	Penambahan Ruang Lingkup	C	104	199.PMHACCPBK07/25	22-Jul-25	22-Jul-27	4 hari	BERLAJU
25	SAMIUDRA SINAR HARAPAN, PT	Jl. Raya Sentul KM 2.7 Blok II B, RT. 06 RW. 03 Kp. Leuwij Jambel, Desa Kadumanggu, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, West Java - Indonesia	Shrimp Crackers	Perpanjangan	B	105	004.PMHACCPBK09/25	01-Sep-25	01-Sep-27	5 hari	BERLAJU
			Dried Fish Maw	Baru	B	106	316.PMHACCPBK09/25	24-Sep-25	24-Sep-27	5 hari	BERLAJU
			Frozen Cephalopoda	Baru	B	107	305.PMHACCPPB/09/25	23-Sep-25	23-Sep-27	4 hari	BERLAJU
			Frozen Demersal Fish	Baru	B	108	301.PMHACCPPB/09/25	23-Sep-25	23-Sep-27	4 hari	BERLAJU
26	SATYA TRINADI KOMIRA PERKASA, PT	Kompleks Pergudangan Kosambi Permai Blok KK 18 Desa Jatimulya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten - Indonesia	Frozen Pelagic Fish	Baru	B	109	302.PMHACCPPB/09/25	23-Sep-25	23-Sep-27	4 hari	BERLAJU
			Frozen Tuna	Baru	B	110	303.PMHACCPPB/09/25	23-Sep-25	23-Sep-27	4 hari	BERLAJU
			Dried Fish	Perpanjangan	B	111	314.PMHACCPBK09/25	24-Sep-25	24-Sep-27	6 hari	BERLAJU
			Dried Flying Fish Roe	Perpanjangan	B	112	315.PMHACCPBK09/25	24-Sep-25	24-Sep-27	6 hari	BERLAJU
27	SEAFOOD NUSANTARA MAKMUR, PT	Jl. Pipa No. 999 RT. 627/614 Desa Blimbing, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten - Indonesia	Frozen Cephalopoda	Perpanjangan	B	113	260.PMHACCPPB/09/25	22-Sep-25	22-Sep-27	4 hari	BERLAJU
			Frozen Demersal Fish	Perpanjangan	B	114	274.PMHACCPPB/09/25	22-Sep-25	22-Sep-27	4 hari	BERLAJU
			Frozen Flying Fish Roe	Perpanjangan	B	115	261.PMHACCPPB/09/25	22-Sep-25	22-Sep-27	4 hari	BERLAJU
			Frozen Freshwater Fish	Penambahan Ruang Lingkup	B	116	252.PMHACCPPB/09/25	22-Sep-25	22-Sep-27	4 hari	BERLAJU
28	SHENGFA INTERNASIONAL TRADING, PT	Jl. Masekal Surya Dharma A.2/01 Kel. Selapajang Jaya, Kec. Naglasari, Kota Tangerang, Banten Indonesia	Frozen Pelagic Fish	Perpanjangan	B	117	275.PMHACCPPB/09/25	22-Sep-25	22-Sep-27	4 hari	BERLAJU
			Frozen Shellfish	Penambahan Ruang Lingkup	B	118	276.PMHACCPPB/09/25	22-Sep-25	22-Sep-27	4 hari	BERLAJU
			Frozen Shrimp	Perpanjangan	B	119	263.PMHACCPPB/09/25	22-Sep-25	22-Sep-27	4 hari	BERLAJU
			Frozen Tuna	Perpanjangan	B	120	277.PMHACCPPB/09/25	22-Sep-25	22-Sep-27	4 hari	BERLAJU
29	SHENGFA INTERNASIONAL TRADING, PT	Jl. Masekal Surya Dharma A.2/01 Kel. Selapajang Jaya, Kec. Naglasari, Kota Tangerang, Banten Indonesia	Fresh Demersal Fish	Perpanjangan	B	121	169.PMHACCPPB/09/25	17-Sep-25	17-Sep-27	6 hari	BERLAJU
			Fresh Pelagic Fish	Perpanjangan	B	122	162.PMHACCPPB/09/25	16-Sep-25	16-Sep-27	5 hari	BERLAJU
			Fresh Shrimp	Perpanjangan	B	123	169.PMHACCPPB/09/25	17-Sep-25	17-Sep-27	6 hari	BERLAJU
			Frozen Cephalopoda	Perpanjangan	B	124	163.PMHACCPPB/09/25	16-Sep-25	16-Sep-27	5 hari	BERLAJU
30	SHENGFA INTERNASIONAL TRADING, PT	Jl. Masekal Surya Dharma A.2/01 Kel. Selapajang Jaya, Kec. Naglasari, Kota Tangerang, Banten Indonesia	Frozen Crab	Perpanjangan	B	125	232.PMHACCPPB/09/25	18-Sep-25	18-Sep-27	7 hari	BERLAJU
			Frozen Demersal Fish	Perpanjangan	B	126	191.PMHACCPPB/09/25	17-Sep-25	17-Sep-27	6 hari	BERLAJU
			Frozen Lobster	Perpanjangan	B	127	233.PMHACCPPB/09/25	18-Sep-25	18-Sep-27	7 hari	BERLAJU
			Frozen Pelagic Fish	Perpanjangan	B	128	164.PMHACCPPB/09/25	16-Sep-25	16-Sep-27	5 hari	BERLAJU
31	SHENGFA INTERNASIONAL TRADING, PT	Jl. Masekal Surya Dharma A.2/01 Kel. Selapajang Jaya, Kec. Naglasari, Kota Tangerang, Banten Indonesia	Frozen Shellfish	Perpanjangan	B	129	234.PMHACCPPB/09/25	18-Sep-25	18-Sep-27	7 hari	BERLAJU
			Frozen Shrimp	Perpanjangan	B	130	162.PMHACCPPB/09/25	17-Sep-25	17-Sep-27	6 hari	BERLAJU
			Frozen Snail	Perpanjangan	B	131	235.PMHACCPPB/09/25	18-Sep-25	18-Sep-27	7 hari	BERLAJU
			Frozen Tuna	Perpanjangan	B	132	165.PMHACCPPB/09/25	16-Sep-25	16-Sep-27	5 hari	BERLAJU
32	SHENGFA INTERNASIONAL TRADING, PT	Jl. Masekal Surya Dharma A.2/01 Kel. Selapajang Jaya, Kec. Naglasari, Kota Tangerang, Banten Indonesia	Live Crab	Baru	B	133	137.PMHACCPPH09/25	14-Sep-25	14-Sep-27	5 hari	BERLAJU
			Live Demersal Fish	Baru	B	134	138.PMHACCPPH09/25	14-Sep-25	14-Sep-27	5 hari	BERLAJU
			Live Eel	Baru	B	135	168.PMHACCPPH09/25	15-Sep-25	15-Sep-27	5 hari	BERLAJU
			Live Lobster	Baru	B	136	139.PMHACCPPH09/25	14-Sep-25	14-Sep-27	5 hari	BERLAJU
33	SHENGFA INTERNASIONAL TRADING, PT	Jl. Masekal Surya Dharma A.2/01 Kel. Selapajang Jaya, Kec. Naglasari, Kota Tangerang, Banten Indonesia	Live Squidamitis	Baru	B	137	140.PMHACCPPH09/25	14-Sep-25	14-Sep-27	5 hari	BERLAJU

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA****PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 050422005008300050001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV LE FARMLE INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0504220050083 |
| 3. Alamat Kantor | : BUKIT PAMULANG INDAH BLOK C 11 NO. 11, Desa/Kelurahan Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Kode Pos: 15417 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam |
| 6. Lokasi Usaha | : Duren Seribu, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Desa/Kelurahan Duren Seribu, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 16518 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 04 Agustus 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Agustus 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 050422005008300050001**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : ID-CBIB-T-32-250211 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : Duren Seribu, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. |
| 3. Komoditas | : Lele (<i>Clarias sp.</i>) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : Cukup |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Laporan Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) Melalui Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I

Tanggal Rekapitulasi : 01 July 2025

No.	Jenis HC	No. Seri	No. Referensi	Nama Perusahaan/UPE	Deskripsi Produk	Berat Bersih	Type Proses	Tujuan
1	B	250012826	01.0-5-04549-2025	CV. BUMI PERTWI	LIVE CRAB	1470 KGS	LIVE	FUZHOU, CHINA
2	B	250012825	01.0-5-04550-2025	CV. BUMI PERTWI	LIVE CRAB	1785 KGS	LIVE	SHANGHAI PU DONG APT, CHN
3	G	250004546	01.0-5-04551-2025	CV. BUMI PERTWI	LIVE	210 KGS	LIVE BABYLON SHELL	TAIPEI - TAIWAN
4	G	250004547	01.0-5-04552-2025	CV. BUMI PERTWI	LIVE	400 KGS	LIVE HARD CLAM	TAIPEI - TAIWAN
5	G	250004548	01.0-5-04553-2025	CV. BUMI PERTWI	LIVE	100 KGS	LIVE NYLON SHELL	TAIPEI - TAIWAN
6	G	250004549	01.0-5-04554-2025	CV. BUMI PERTWI	LIVE	450 KGS	LIVE BABYLON SHELL	TAIPEI - TAIWAN
7	G	250004545	01.0-5-04555-2025	CV. MUARA LAUT	LIVE	140 KGS	LIVE BABYLON SHELL	TAIPEI - TAIWAN
8	H	25034391	01.0-5-04557-2025	PT. AGAR SWALLOW	AGAR-AGAR POWDER	455.00 KGS	DRIED	UZBEKISTAN
9	TR		01.0-5-04558-2025	PT. FRESH ON TIME SEAFOOD	FROZEN CRABMEAT	6,172.72 KGS	FROZEN "WILD CAUGHT"	LE HAVRE PORT, FRANCE
10	TR		01.0-5-04559-2025	PT. FRESH ON TIME SEAFOOD	FROZEN CRABMEAT	8.00 KGS	FROZEN "WILD CAUGHT"	LE HAVRE PORT, FRANCE
11	G	250004602	01.0-5-04560-2025	CV. MUARA LAUT	LIVE	330 KGS	LIVE BABYLON SHELL	TAIPEI - TAIWAN
12	H	25034392	01.0-5-04561-2025	PT. FRESH ON TIME SEAFOOD	FROZEN DEEP SEA SNOW CRABMEAT	5,000.00 KGS	FROZEN	SYDNEY, AUSTRALIA
13	TR		01.0-5-04562-2025	PT. FRESH ON TIME SEAFOOD	FROZEN MSC PACIFIC COD, FROZEN MSC HADDOCK	10.00 KGS	FROZEN "WILD CAUGHT"	LE HAVRE PORT, FRANCE
14	TR		01.0-5-04563-2025	PT. FRESH ON TIME SEAFOOD	PASTERURIZED CRABMEAT	8,128.42 KGS	PASTERURIZED "WILD CAUGHT"	AARHUS, DENMARK
15	G	250004550	01.0-5-04564-2025	CV. MUARA LAUT	LIVE	330 KGS	LIVE BABYLON SHELL	TAIPEI - TAIWAN
16	G	250004601	01.0-5-04565-2025	CV. MUARA LAUT	LIVE	440 KGS	LIVE BABYLON SHELL	TAIPEI - TAIWAN
17	H	25034393	01.0-5-04566-2025	CV. MUARA LAUT	FRESH GROUPER FISH	24.2 KGS	FRESH	JEDDAH, SAUDI ARABIA
18	H	25034396	01.0-5-04567-2025	CV. MUARA LAUT	FRESH PARROT FISH	80 KGS	FRESH	JEDDAH, SAUDI ARABIA
19	H	25034394	01.0-5-04568-2025	CV. MUARA LAUT	FRESH CORAL TROUT FISH	64.2 KGS	FRESH	JEDDAH, SAUDI ARABIA
20	H	25034395	01.0-5-04569-2025	CV. MUARA LAUT	FRESH KING FISH	500 KGS	FRESH	JEDDAH, SAUDI ARABIA
21	A	250000489	01.0-5-04570-2025	PT. MINA JAYA WYSSA	LIVE MUD CRAB	155.7 KGS	LIVE	INCHON, SOUTH KOREA
22	B	250012831	01.0-5-04571-2025	CV. MUARA LAUT	FRESH POMPRET FISH	396 KGS	FRESH	XIAMEN, CHINA
23	B	250012832	01.0-5-04572-2025	CV. MUARA LAUT	FRESH POMPRET FISH	396 KGS	FRESH	XIAMEN, CHINA
24	B	250012835	01.0-5-04573-2025	CV. BUMI PERTWI	FRESH POMPRET FISH	280 KGS	FRESH	XIAMEN, CHINA

Data IKM

Triwulan 3

2025

Submit

50 Data terakhir Tw 3/2025 - Kepmen 20/2025, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

Download Data

10 entries per page

Balai Besar KIPM Jakarta I

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bmutu	Balai Besar KIPM Jakarta I	2025	3	4.92	92.57	74

Showing 1 to 1 of 1 entries

Data IKM

Triwulan 3

2025

Submit

Data Rekap per UPP per Layanan Tw 3/2025 - Kepmen 20/2025

Download Data

10 entries per page

Search...

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Nama Layanan	Jml Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	SKM
bmutu	Balai Besar KIPM Jakarta I	2025	3	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	9	3.89	3.78	3.78	3.78	3.89	3.56	3.78	3.89	3.56	3.77	94.14
bmutu	Balai Besar KIPM Jakarta I	2025	3	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)	1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00
bmutu	Balai Besar KIPM Jakarta I	2025	3	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)	2	3.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.06	76.39
bmutu	Balai Besar KIPM Jakarta I	2025	3	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	21	3.81	3.76	3.71	3.71	3.67	3.62	3.67	3.67	3.67	3.70	92.46
bmutu	Balai Besar KIPM Jakarta I	2025	3	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	14	3.86	3.71	3.79	3.86	3.71	3.71	3.64	3.86	3.79	3.77	94.25
bmutu	Balai Besar KIPM Jakarta I	2025	3	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)	27	3.81	3.74	3.63	3.78	3.67	3.67	3.63	3.70	3.56	3.69	92.18

Showing 1 to 6 of 6 entries



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 15
JAKARTA 10115, NOTAR POS 4130 XPP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LAGAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agung Santoso**
Jabatan : **Pt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama
Pt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Jakarta I



Agung Santoso

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
	2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
	3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	99
SK.2 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	100
	5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Nilai)	82
	6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I	86
	7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	85
	8. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Indeks)	3,36

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.917.575.849
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	177.500.000
Total Anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2025		6.095.075.849

Tangerang, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Pt. Kepala Balai Besar Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I



Ditandatangani
Secara Elektronik

Agung Santoso